

KPU Bombana Buat 3 Rancangan Penataan DAPIL Pemilu 2024

Bombana, SultraNET. - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana mengumumkan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana dalam Pemilihan Umum 2024. [PENGUMUMAN PENDAPILAN](#)

Pengumuman itu berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor : 66/PL.01.3-BA/7406/2/2022 tentang Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bombana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pengumuman ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Tanggapan masyarakat mulai diterima pada tanggal 23 November hingga 6 Desember 2024, tanggapan dibuat secara tertulis sesuai format yang dapat di unduh pada laman <https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan>.

Penyampaian masukan atau tanggapan dilengkapi dengan surat pengantar resmi bagi lembaga/badan/organisasi masyarakat/partai politik atau identitas diri foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi perorangan.

Penyampaian dokumen sesuai jadwal dapat dilakukan dengan cara diantar langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, Jalan Yos Sudarso, Komplek Pelabuhan Kasipute, Kecamatan Rumbia pada jam 08:00 hingga 16:00 wita, atau melalui laman <https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan>.

Kepada awak media, Kamis (24/11/2022) Ketua KPU Bombana, Aminuddin mengatakan rancangan penataan Dapil tidak mengubah alokasi kursi DPRD Kabupaten Bombana secara umum, rancangan yang dibuat dengan tiga rancangan itu disusun berdasarkan tujuh prinsip sebagaimana diatur dalam PKPU 6/2022.

Prinsip dimaksud yaitu memiliki kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan berkesinambungan.

“Untuk alokasi kursi DPRD Bombana 2024 tetap 25 kursi,” ujar Aminuddin.

Aminuddin menambahkan Rancangan Penataan Dapil sifatnya belum final lantaran masih bersifat rancangan sembari menerima masukan dan tanggapan warga terhadap rancangan penataan dapil tersebut.

“Saat ini kami masih menerima masukan dari masyarakat luas. Nanti akan ada uji publik,” tandasnya.

Adapun Rancangan penataan Dapil Pemilu 2024 yaitu Rancangan Pertama masih sama saat Pemilu tahun 2019 lalu yakni Dapil 1 meliputi : Rumbia, Rumbia Tengah, Mataoleo dan Masaloka Raya dengan total Kursi 5. Dapil 2 Meliputi : Poleang Timur, Poleang Utara, Poleang Selatan, Poleang Tenggara dengan Total Kursi 5. Dapil 3 meliputi : Poleang , Poleang Barat Poleang Tengah Tontonunu dengan total kursi 6. Dapil 4 Meliputi : Rarowatu, Rarowatu Utara, Lantari Jaya dan Matausu dengan Total Kursi 4. Dapil 5 Meliputi : Kabaena, Kabaena Timur, Kabaena Selatan, Kabaena Barat, Kabaena Utara, Kabaena Tengah dengan total kursi 5.

Rancangan Kedua yaitu : Dapil 1 meliputi Kecamatan Rumbia, Mataoleo, Masaloka Raya, Rumbia Tengah dengan Total Kursi 5, Dapil 2 meliputi Kecamatan Kabaena, Kabaena Timur, Kabaena Selatan, Kabaena Barat, Kabaena Tengah, Kabaena Utara, dengan total kursi 5, Dapil 3 meliputi Poleang Timur, Poleang Utara, Poleang Tenggara dan Tontonunu dengan total kursi 5, Dapil 4 Meliputi Poleang, Poleang Barat, Poleang Selatan, Poleang Tengah dengan total kursi 6, Dapil 5 Meliputi Rarowatu, Rarowatu Utara, Lantari Jaya, Matausu dengan total Kursi 4.

Untuk Rancangan Ketiga : Dapil 1 meliputi Rumbia, Rumbia Tengah, Mataoleo, Masaloka Raya dengan total Kursi 5. Dapil 2 Meliputi Kabaena, Kabaena Timur, Kabaena Selatan, Kabaena Barat, Kabaena Barat, Kabaena Utara, Kabaena Tengah dengan total kursi 5. Dapil 3 Meliputi Poleang Timur, Poleang Selatan, Poleang Tenggara dengan total kursi 3. Dapil 4 Meliputi Poleang, Poleang Barat, Poleang Tengah dengan total kursi 5. Dapil 5 poleang Utara, Tontonunu, Matausu dengan total kursi 3. Dapil 6 Meliputi Rarowatu, Rarowatu Utara, Lantari Jaya dengan total kursi 4. (**ADV**)

[Pengumuman Lengkap Dapat diunduh pada link dibawah ini.](#)

PENGUMUMAN PENDAPILAN

Pastikan Akurasi Alat, Dinkes Bombana Kalibrasi Alkes Seluruh Puskesmas

Rumbia, SultraNET. – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana melakukan kalibrasi alat kesehatan (Alkes) di semua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di Daerah itu agar menghindari salah diagnosa awal dan menjaga mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Darwin Ismail menjelaskan, kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat kesehatan. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan menggunakan alat kesehatan tersebut akurat dan konsisten. Kalibrasi alkes dilakukan setiap tahun, dengan berkeliling di setiap Puskemas.

“Dengan kalibrasi ini, kita bisa jamin alat-alat kesehatan yang digunakan di seluruh Puskesmas senantiasa selalu dikoreksi, diperiksa, sehingga menjadi standar, meskipun barangnya sudah lama,” Jelas Darwin saat di temui awak Media ini, Senin (21/11/2022).

Hal senada disampaikan Kepala Seksi Kefarmasian Dinkes Bombana, Vivin Erfiani ia menjelaskan kalibrasi alat kesehatan telah banyak membantu daerah untuk menghemat anggaran sekaligus menjaga mutu kesehatan.

Meskipun Alkes yang digunakan merupakan barang lama, sepanjang masih terjamin akurasinya, maka Alkes tersebut tetap dapat digunakan tanpa harus mengadakan alat baru.

“Alat-alat yang digunakan kita jamin terstandardisasi, sehingga hasil diagnosa tidak diragukan,” Ujar Vivin.

Dalam proses kalibrasi ini, pemerintah daerah bekerjasama dengan Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan (BPFK) Makassar. Semua kegiatan kalibrasi dibiayai oleh Pemerintah Daerah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Kalibrasi ini juga wujud komitmen kami dalam Rangka peningkatan Kualitas Pelayanan,” pungkasnya.

Petugas PSC 119 Bombana, Bangga Layani Orang Sakit

Rumbia, SultraNET. - Berbagai pengalaman dialami petugas Public Safety Centre (PSC) 119 Kabupaten Bombana saat bertugas menangani pasien yang akan dijemput.

Banyak hal yang menarik hingga mengundang rasa empati. Tak sedikit dari mereka juga harus berjuang tak kenal lelah sebagai bentuk tanggung jawab atas profesi yang dijalankan.

Meski demikian, mereka tetap semangat dan bangga menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Seperti yang dirasakan oleh Marwah Astuti, salah satu petugas PSC 119 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.

Selama bertugas sebagai perawat dalam tim PSC 119, banyak pengalaman menarik yang dirasakan dalam menangani pasien. Seperti mendapat panggilan untuk menjemput pasien yang berada di daerah pelosok

“Kami pernah mendapat panggilan pasien untuk dijemput. Rumah pasien harus ditempuh cukup jauh dan medan yang terjal bahkan harus pakai tandu untuk sampai kerumah pasien,” ceritanya, Selasa (22/11/2022).



Petugas PSC 119 Saat Menjemput Pasien

Alumnus Poltekes Makassar tahun 2018 ini juga menambahkan Meski rasa lelah kerap ia rasakan, namun hal itu dapat terobati ketika mampu memberikan pertolongan dengan cepat kepada pasien.

“Selaku petugas PSC 119 kami merasa bangga dan terharu bisa menolong masyarakat yang sedang sakit. Apalagi jika ada pasien atau keluarga pasien yang merasa sangat terbantu dan senang dengan kedatangan kami serta mengucapkan terima kasih. Ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus menyelamatkan pasien apapun resikonya,” tambah Putri ke Empat Pasangan Mahyuddin dan Hj.Sitti Akhira itu.

Tuti juga berharap agar masyarakat Bombana bisa memanfaatkan layanan gratis ini, hanya dengan menghubungi nomor telepon layanan PSC 119 Kabupaten Bombana (081 3611 74119 dengan 085361581119)

“Dalam memberikan pelayanan, tim PSC tidak mengenal waktu sehingga petugas yang terdiri dari dokter, perawat dan bidan ini selalu siap 24 jam menerima panggilan pasien dimana saja selama berada di wilayah Kabupaten Bombana”

Dikbud Bombana Kembali Alokasikan Dana “Reward” Pendidikan Non Formal

Bombana, SultraNET. - Pemerintah Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kembali mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) untuk tahun anggaran 2023 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana, A. Muh. Arsyad, S.Sos. M.Si, Selasa (22/11/2022) mengatakan pemberian reward kepada Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) sudah dimulai sejak tahun 2021 lalu hingga saat ini.

Bentuk reward yang diberikan berupa bantuan dana bagi SPNF yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang besarnya sesuai dengan jumlah siswa yang diluluskan dengan usia yang tidak ditanggung dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pusat.

“Jadi teman teman PKBM atau SKB di Bombana ini, selain menerima dana BOP dari Pusat, juga ada dana dari Pemda, yang sifatnya semacam penghargaan Pemda atas upaya mereka karena mampu menamatkan warga belajar yang usianya itu diluar tanggungan BOP dari Pusat,” ujar A. Muh. Arsyad.

Mantan Kepala Dinas Sosial Bombana itu menjelaskan, keberadaan SPNF di Bombana sangat berkontribusi besar pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Kalau RLS konteksnya adalah warga belajar yang usia 25 tahun ke atas, sedangkan SPM konteksnya adalah warga belajar yang usiax 7-18 tahun yang tidak sedang bersekolah di pendidikan formal,” jelasnya.

Ia mengakui, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Pendidikan Non Formal adalah bagaimana pembiayaan warga belajar yang tidak dihitung dalam pengalokasian BOP Pusat sebagai sumber pembiayaan lembaga.

“Salah satu cara kita mengatasi hal itu adalah dengan adanya dukungan dana setelah warganya ditamatkan. Jadi penghitungan pengalokasiannya berdasarkan jumlah warga belajar yang memperoleh ijazah pada tahun berkenaan,” bebernya.

Untuk itu, ia berharap pengelola Pendidikan Non Formal tetap memaksimalkan penerimaan warga belajar, bukan hanya pada usia yang dibiayai oleh BOP Pusat melainkan termasuk usia diatas 21 tahun.

“Intinya untuk tahun 2023 dana *reward* lulusan yang tidak ditanggung BOP Pusat tetap di anggarkan,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dikbud Bombana, Binnuraeni AS., SE., S.Pd menjelaskan, saat ini jumlah Satuan Pendidikan Non Formal di Bombana sebanyak 68 lembaga termasuk SPNF SKB.

Kendati demikian, pihaknya mendeteksi ada beberapa lembaga yang sudah tidak melakukan update dapodiknya sehingga ia memastikan bakal segera mengonfirmasi kepada pengelola, apakah lembaga ini masih aktif melakukan kegiatannya atau sudah tidak.

“Kalau memang tidak, agar segera dilakukan penutupan lembaga tersebut,” singkatnya. (IS)

Audit Kasus Stunting, Pemkab Bombana Bergerak Cepat

Bombana, SultraNET. | Audit Kasus Stunting menjadi kegiatan prioritas pada Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, sehingga pencegahan harus dilakukan secara bertahap agar kasus tidak semakin memburuk atau tidak

berulang lagi di suatu wilayah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Man Arfa saat mewakili Penjabat Bupati Bombana, H. Burhanuddin menyampaikan sambutan pada kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting, bertempat di Auditorium Tanduale Kantor Bupati Bombana, Selasa (22/11/2022).

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bombana itu menyebut pelaksanaan kegiatan itu merujuk Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta penyediaan hasil pertemuan Tim Audit Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Bombana.

“Pembekalan sudah bergerak secara cepat, terintegrasi dan konvergen dalam penanganan Stunting yang sangat serius yakni melalui pembentukan Tim Audit Kasus Stunting,” ujar Man Arfa.

Ia menjelaskan berdasarkan data yang ada, presentase kasus Stunting di Kabupaten Bombana adalah 26,8 persen dan target untuk kasus Stunting secara nasional diharapkan dari 26,8 persen turun menjadi 15,49 persen pada tahun 2024.

Ia berharap seluruh elemen baik dari tingkat kabupateb hingga ke tingkat desa untuk berperan aktif dalam penanganan kasus stunting di Bombana.

“Agar kegiatan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dapat menjadi program jaminan berhasilnya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Untuk diketahui kegiatan itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Forkopimda Kabupaten Bombana, Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan, para Pejabat eselon 2 Pemerintah Kabupaten Bombana, Camat se-Kabupaten Bombana dan undangan. (Adv)

Ratusan Unit Mesin Pompa Air Disalurkan di Bombana

Rumbia, sultranet.com | Sebanyak 483 unit Mesin Pompa Air Program Konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) disalurkan kepada petani di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin 21 November 2022.

Kepala Dinas Pertanian Bombana, Muhammad Siarah mengatakan penyaluran ratusan unit mesin pompa air itu merupakan Bantuan dari Kementerian Pertanian yang di inisiasi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Partai Demokrat, Rusda Mahmud yang menyasar petani dengan lahan sawah tada hujan yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bombana.

“Bantuan pertanian yang di fasilitasi oleh Rusda Mahmud untuk Bombana sudah tiga tahun berturut turut, bantuan Pompa air ini yang ke dua kalinya, yang pertama itu pompa air diberikan sebanyak 100 unit dan tahun ini kita dibantu sebanyak 400 unit lebih,” ujar Muhammad Siarah.

Menurut Siarah, bantuan ini sangat bermanfaat bagi para petani khususnya Petani Padi sawah dan Petani Holtikultura karena masih terdapat sekitar enam ribu hektar lahan sawah tada hujan di Bombana.

“Ini akan sangat meningkatkan produksi para petani kita, petani sawah lahan tada hujan itu memiliki masalah terhadap penyediaan air, dengan bantuan ini kita harapkan produksi pertanian khususnya petani padi sawah kita dapat meningkat,” bebernya.

Selain itu, bantuan ini sangat menekan biaya produksi petani diketahui dengan penggunaan pompa air menggunakan bahan bakar minyak biayanya lebih besar dari pompa air yang menggunakan bahan bakar gas.

“Kita coba mengefisiensi pengeluaran petani kita, kalau petani pake mesin pompa air dari bahan bakar minyak biayanya tentu sangat mahal petani harus mengeluarkan uang sebesar tiga jutaan lebih perhektar sedangkan jika petani menggunakan mesin pompa dari bahan bakar gas, petani hanya akan mengeluarkan biaya kurang lebih sembilan ratusan ribu,” tandasnya.

Ketua Kwartir Cabang Pramuka Bombana Buka Kursus Pembina Mahir Tingkat Dasar

Bombana, SultraNET. | Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bombana, Ir. Johan Salim, SP.,MM membuka kegiatan Kursus Pembina Mahir Tingkat Dasar (KPMD), Minggu 20 November 2022 di lapangan merdeka Boepinang Kec. Poleang.

Pada acara pembukaan Johan Salim menyampaikan bahwa Kursus Mahir Tingkat Dasar ini dilaksanakan oleh Kwartir Cabang Bombana dalam rangka peningkatan kapasitas para pembina Pramuka di gugus depan agar mampu mendidik anak-anak dalam rangka pembentukan karakter bagi generasi muda selanjutnya.

Peserta kursus dilaporkan oleh ketua panitia Haris Ismail berjumlah 85 orang yang berasal dari sebahagian besar guru SD, SMP dan SMA kemudian dibagi menjadi dua kelas yang di dampingi oleh 12 orang pelatih dari Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan Daerah (Pusdiklatda) Sulawesi Tenggara selama kurang waktu satu Minggu.

Selama tujuh hari kedepan, peserta KMD Gerakan Pramuka akan dibekali dan dilatih tentang teknik dasar melakukan pembinaan di gugus depan berdasarkan metode pendidikan kependuan serta materi materi lainnya agar lulusan KMD benar benar mampu menjadi pembina Pramuka yang handal dan berkualitas.

Johan Salim selaku ketua Kwartir Cabang Pramuka Bombana yang juga mantan wakil Bupati Bombana mengatakan, para Pembina yang mengikuti KMD dipersiapkan untuk menunjang kurikulum pendidikan merdeka belajar maupun konsep sekolah penggerak yang saat ini sedang dipersiapkan.

“Pembina pembina ini di bentuk untuk menjadi pelengkap dalam kurikulum pendidikan, disana ada namanya belajar Pancasila, ada bela negara ada juga kurikulum merdeka belajar, mereka akan lebih mudah membentuk karakter anak

setelah mengikuti kursus ini,” ungkap Johan Salim.



Kegiatan Kursus Pembina Mahir Tingkat Dasar

Ditempat yang sama, Sekertaris Kwarcab Bombana Agustamin Saleko menambahkan bahwa pelaksanaan KMD saat ini adalah salah satu bentuk strategi Kwartir dalam program penguatan kelembagaan tingkat Gugus Depan yang selama ini Gugus Depan dinilai belum efektif menjalankan fungsinya.

Sekertaris Kwarcab Bombana menegaskan bahwa tahun 2023 Kwarcab akan melakukan verifikasi hingga tingkat sekolah atau gugus depan, yang hasilnya dapat berupa pencabutan nomor gugus depan jika dinilai tidak layak berdirinya gugus depan atau gudep di sekolah tersebut sehingga sejak saat itu Kwarcab mempersiapkan langkah strategis salah satunya adalah menyiapkan para pembina pembina Pramuka melalui KMD.

“Kedepannya kwarcab akan turun ke masing-masing sekolah untuk melihat kelayakan gugus depan, jika tidak sesuai dengan aturan pendirian gudep, maka kami akan bekukan gudep tersebut hingga terpenuhi syarat syarat gugus depan,

salah satunya adalah ini para pembina Pramuka, ada gudepnya tidak ada pembinanya, bagaimana bisa berkembang itu gudep” papar Agustamin.

Dalam penjelasan selanjutnya sekertaris Kwarcab menjelaskan dampak yang akan di terima oleh para Majelis Pembimbing Gugus Depan (MABIGUS) yang exsofficio dijabat oleh Kepala Sekolah jika Gugus Depannya di bekukan adalah dari segi pengalokasian dana BOS tentang kegiatan ekstrakurikuler di bidang kepramukaan tidak dapat di lakukan disebabkan oleh pencabutan nomor gugus depan oleh Kwarcab.

“Nanti kita akan evaluasi gugus depan, kalau tidak lengkap komponen gugus depan seperti salah satunya ketersediaan pembina yang memiliki legalitas sebagai pembina, maka kita akan bekukan gugus depannya, tentu setelah di bekukan maka tidak dapat mereka pertanggung jawabkan anggaran dana BOSnya terutama di bagian ekstrakurikuler kepramukaan,” jelas Agustamin

Melalui Kursus Pembina Mahir Tingkat Dasar diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi kepramukaan di Bombana serta Pemerintah Bombana dan lebih khusus peran Pramuka dalam membentuk karakter bagi anak anak di Kabupaten Bombana.

“Harapan kita para pembina keluaran KMD ini bisa menjadi semangat baru bagi Pemerintah dan Pramuka itu sendiri dapat menciptakan karakter anak bangsa terkhusus di Bombana.” tutup Agustamin (***)

Baliho ANS di Bombana Diturunkan Satpol-PP

Bombana, SultraNET. | Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) utusan Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Nirwana Sebbu (ANS) menyampaikan keberatan atas penurunan sepihak Baliho milik dirinya yang terpasang di Ibu Kota Bombana, Sabtu (19/11/2022)

Kepada awak media, Senator yang juga mantan Ketua TP-PKK Bombana itu mengaku sangat menyayangkan tindakan secara sepihak Pemerintah Kabupaten Bombana yang menurunkan Balihonya.

Baliho yang diturunkan merupakan ucapan selamat atas Pengukuhan Ikatan Alumni UNHAS Kabupaten Bombana Tahun 2022 dan ucapan Selamat Hari Pahlawan yang terpasang di area Tugu Munajah Bombana.

Penurunan baliho dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bombana pada hari Kamis-Jum'at 17-18 November 2022 dengan alasan penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) serta menjalankan instruksi Penjabat Bupati Bombana.

"Pemasangan baliho milik saya sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan K3," ujar Andi Nirwana Sebbu.

Ia menyebut balihonya tidak mengotori, tidak mengganggu, dan tidak merusak fasilitas umum serta sesuai kesadaran akan tanggung jawab keindahan lingkungan karena baliho dipasang di seluruh kabupaten/kota termasuk salah satunya di kabupaten Bombana.

Baliho yang terpasang di papan papan reklame yang bersifat permanen dengan konstruksi tetap, bukan dipasang menggunakan kayu atau sejenisnya dan keberadaannya sudah bertahun tahun.

"Jika pemerintah Kabupaten bombana menganggap bahwa itu melanggar, kenapa balihonya saja yang diturunkan sedangkan papan reklamnya tidak dibongkar," sebutnya

Terlebih, pemasangan baliho miliknya telah menunjuk Pihak Ketiga sesuai kontrak dan dibayar menggunakan uang negara, sehingga tindakan penurunan secara sepihak tanpa melakukan konfirmasi dan komunikasi dengan Pihak Saya atau pihak ketiga ini telah merugikan pihaknya.

"Ini mencerminkan sikap arogansi Pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan yang sudah ada," tegasnya

Disamping itu, Baliho yang dipasang bukan reklame komersial sesuai Peraturan

Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pajak Reklame.

Baliho dimaksud tidak termasuk sebagai objek pajak reklame sesuai pasal 3.3.d dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, yaitu reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak termasuk sebagai objek pajak reklame.

ANS selaku Anggota DPD RI yang merupakan Pejabat Negara mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang secara otomatis adalah bagian dari Pemerintah yang memasang baliho dengan tema seperti di baliho yang diturunkan merupakan bentuk program publikasi yang menjadi salah satu tugas sebagai Anggota DPD RI pada setiap event dan momentum skala nasional maupun daerah diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Seharusnya Pemerintah Kabupaten Bombana membuat aturan terkait baliho atau reklame non komersial sebelum melakukan penertiban agar masyarakat atau siapapun yang akan memasang baliho dan sejenisnya tidak melanggar aturan Pemerintah Daerah setempat.

“Kejadian penurunan baliho milik saya hanya terjadi di Kabupaten Bombana. Apakah Kabupaten Bombana memiliki aturan sendiri yang berbeda dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebijakan ini tentu sangat kami sayangkan,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bombana, Rusman Idja menjelaskan penertiban baliho di Ibu Kota Bombana merupakan instruksi pimpinan sebagai upaya penataan ibu kota.

Ia menyebut pemasangan baliho memiliki aturan yang mengatur terkait tempat pemasangan dan cara pemasangan.

“Memang kita lihat di Bombana pemasangan baliho sudah semrawut,” ujar Rusman Idja.

Mantan Kepala BKPSDM Bombana itu menyebut kendatipun penertiban dilakukan berdasarkan peraturan daerah namun hasil dari penertiban yang dilakukan tidak serta merta dimusnahkan.

“Jika kami lihat tidak ada izinnya, Balihonya kami turunkan lalu kami amankan di kantor,” bebernya.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika ada pihak yang ingin mengambil balihonya kembali dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa baliho dimaksud telah dilakukan pembayaran pajak.

“Jika ada izinnya silahkan balihonya diambil kembali dan konfirmasi ke bidang tata ruang dimana mau dipasang agar tidak semrawut, jika belum ada silahkan izinnya di urus dulu,” jelasnya

Ia menambahkan kendatipun baliho dipasang di papan reklame permanen, namun yang perlu diperhatikan apakah papan reklamnya memiliki izin saat didirikan atau tidak.

“Atau saat pemasangan balihonya apakah sudah membayar pajaknya,” tegasnya.

Ia memastikan seluruh baliho yang ditertibkan pihaknya merupakan baliho yang pajak retribusinya tidak dibayarkan kepada daerah.

“Di Ibu Kota itu yang bayar pajak cuma reklame rokok, mereka bayarnya pertahun,” pungkasnya. (Idris hayang).

Golkar Bombana Dukung Pembangunan Gedung Baru Kantor DPRD

Bombana, SultraNET. | Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung rencana pembangunan gedung baru Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana.

Kepada awak media ini, Kamis (17/11/2022) Basmin selaku Wakil Ketua DPD

Partai Golkar Bombana mengatakan rencana pemerintah untuk membangun gedung baru pada kantor DPRD Bombana senilai 15 Milyar merupakan rencana yang tepat mengingat kondisi kantor perwakilan rakyat Bombana saat ini kurang memadai baik dari segi bangunan maupun fasilitas penunjang.

“Pembangunan gedung yang baru itu seharusnya dipandang sebagai sebuah keniscayaan, faktanya, kantor DPRD yang sekarang sangat tidak memadai,” ujar Basmin.

Alumni Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai, kehadiran Kantor DPRD representatif dan semua fasilitas pendukung yang memadai memang dibutuhkan anggota Dewan untuk menunjang kinerja DPRD dalam melayani dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ia menegaskan, rencana untuk membangun gedung baru Kantor DPRD Bombana sudah sangat tepat dan patut didukung melihat kondisi Kantor DPRD Bombana yang masih jauh dari kata memadai.

Terlebih untuk memaksimalkan tiga fungsi utama DPRD yaitu Legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi Anggaran, yaitu kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) dan pengawasan yaitu kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

“DPRD itu kan rumah aspirasi, rumahnya perwakilan masyarakat Bombana. Sehingga dibutuhkan suasana yang nyaman dan berkualitas untuk memikirkan dan mewujudkan kehendak masyarakat,” jelas Basmin

Untuk itu, ia berharap kepada semua fraksi yang ada di DPRD Bombana untuk bersepakat terkait rencana pembangunan gedung baru kantor DPRD.

“Tentu harapan kita dengan adanya pembangunan gedung baru kantor DPRD, dapat meningkatkan pula kualitas pelayanan mereka dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Bombana,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pada pandangan umum fraksi di DPRD Bombana, Kamis (17/11/2022) beberapa fraksi meminta rencana pembangunan kantor DPRD ditinjau kembali mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas.

Ampuh Sultra Resmi Laporkan IPDA ES ke Mabes Polri, Terkait Bisnis Tambang

Kendari, SultraNET. | Polemik dugaan oknum polisi pemain tambang di Sulawesi Tenggara kini telah sampai di meja Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Markas Besar (mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (polri).

Oknum polisi berpangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) berinisial ES dilaporkan atas beberapa dugaan pelanggaran seperti, dugaan pelanggaran disiplin polri hingga dugaan ilegal mining.

Oknum Perwira Pertama tersebut dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) ke Div. Propam Mabes Polri pada, Kamis (17/11/22).

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengatakan, pelaporan yang dilakukan pihaknya hari ini merupakan bentuk eksistensi dan konsistensi lembaga yang dipimpinnya tersebut.

“Giat pelaporan hari ini merupakan pembuktian terhadap eksistensi dan konsistensi lembaga kami Ampuh Sultra dalam mengawal penegakkan supremasi hukum di Bumi Anoa tanpa terkecuali”. Katanya saat di konfirmasi melalui sambungan Whatsapp pribadinya, Kamis (17/11/22).

Apalagi, lanjutnya, apa yang dilakukan pihaknya saat ini berbanding lurus dengan harapan bapak presiden Jokowi dan bapak kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, yakni memberantas mafia dan oknum polisi yang berbisnis tambang.

“Terkait dengan pelaporan kami hari ini, berkaitan dengan pemberantasan mafia tambang dan juga keterlibatan oknum polisi berbisnis tambang. Dan hal itu

menurut kami berbanding lurus dengan instruksi Presiden Jokowi dan pak Kapolri". Ucapan aktivis nasional asal Konawe Utara itu.

DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
BAGIAN PELAYANAN PENGADUAN



SURAT PENERIMAAN SURAT PENGADUAN PROPAM

Nomor : SPSP2/7061/XI/2022/Bagyanduan

-----Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Saya:-----
----- AGUS MULYANA, S.H. -----

Pangkat/Nrp. Aipda/72080011 sebagai Operator Sentra Pelayanan Propam Tim II, menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 17 November 2022, Pukul 13.00. WIB, telah menerima surat dari seorang yang mengaku:

Nama : Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (AMPUH SULTRA);
Pekerjaan : ██████████
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : ██████████
No. Telp. : ██████████
Yang ditujukan : Kadivpropam Polri;
Lampiran : 1 (satu) berkas terlampir;
Perihal : Pengaduan atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Ipda Eko ██████████ selaku anggota Polda Sulawesi Tenggara terkait kepemilikan saham di perusahaan tambang PT. Naga Bumi Utama di kabupaten Konawe Utara Prov. Sultra.

Demikian Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Call Center

- 021-7218615 (Hotline Bagyanduan)
- 081319178714 (Hotline Propam Presisi)
- 081398332594 (Hotline Biro Paminal)
- 089619640748 (Hotline Biro Provos)
- 081291107678 (Hotline Biro Wabprof)
- 081398592061 (Whatsapp SP3D)

Jakarta, 17 November 2022

PENERIMA SURAT

AGUS MULYANA, S.H.
AIPDA NRP 72080011

Bukti Pelaporan di Mabes Polri

Hendro menerangkan, larangan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (polri) untuk berbisnis termasuk bisnis tambang tertuang dalam Pasal 5 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Nah,terkait dengan oknum polisi berinisial ES itu menurut kami, jelas telah melanggar peraturan disiplin polri sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 2 Tahun 2003”. Terangnya

Lebih lanjut, mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta itu menjelaskan, bahwa selain laporan terkait disiplin polri, pihaknya juga tengah mempersiapkan laporan pidana terkait dugaan ilegal mining di wilayah Morombo, Konawe Utara yang melibatkan oknum polisi berinisial ES tersebut.

“Materinya ada dua, yang pertama menyangkut ES sebagai anggota polri yang menjalankan bisnis tambang. Kedua terkait dugaan tindak pidana ilegal mining selama bertahun-tahun yang terindikasi terhubung dalam lingkaran mafia tambang”. Jelasnya

Oleh karena itu, Hendro berharap agar Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo benar-benar konsisten untuk menindak tegas anggotanya yang terlibat berbisnis tambang.

“Harapan kami agar oknum polisi berinisial ES ini segera di copot dan diberhentikan dari anggota kepolisian. Kemudian segera di telusuri terkait keterlibatan ES dalam praktik pertambangan ilegal di Konawe Utara selama bertahun-tahun”. Tutupnya. (Rls)